

SOCIAL ENGINEERING DIBIDANG IPK DAN KEMAMPUAN PERWIRA STAF POLRES DALAM PERENCANAAN OPERASIONAL

(Suatu Study Kasus Di Polres Jembrana, Bali)
Oleh : Drs. P. Purwoko,

PENDAHULUAN

Di samping peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional juga mempunyai dampak terhadap peningkatan kriminalitas dan gangguan Kamtibmas lainnya, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kriminalitas tersebut terjadi karena masyarakat sebagai sumber kriminalitas itu sendiri, dan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan mengalami perkembangan selaras dengan dinamika pembangunan.

Seirama dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan kriminalitas, pimpinan Polri telah mengeluarkan strategi yang mencakup upaya represif, preventif dan preemptive. Sebagai upaya preventif, khususnya dalam menggunakan dan mengarahkan serta mempengaruhi masyarakat untuk menjaga keselamatan diri dan lingkungannya, secara bertahap dan berlanjut telah mulai dibangun adanya kualitas Infra Struktur Penanggulangan Kriminalitas (IPK) yang diharapkan disamping dapat memberikan daya

kekebalan dan daya lawan masyarakat serta adanya jalinan informasi antara Polri dan masyarakat namun juga masyarakat sendiri mampu memobilisasikan sumber daya lokal bila terjadi bencana massal. 1)

Masih berkaitan dengan IPK tersebut, May. Jen. Pol. Drs Soetjipno mengatakan bahwa Polri lebih mengutamakan upaya preventif daripada represif. Hal tersebut ditandai dengan upaya social engineering dalam infra struktur maupun supra struktur masyarakat dalam arti luas.

2) Sedangkan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH MA dalam tanggapannya mengenai kasus rekonstruksi seksual di Malang mengatakan : "Dalam masa transisi budaya seperti sekarang, seyogyanya Polri lebih menekankan fungsi Binmas (pembinaan masyarakat) dibanding fungsi enforcement-nya."3)

Berkenaan dengan social engineering di bidang IPK tersebut penulis tertarik untuk mencoba menganalisis dari pendekatan manajemen, terutama dari segi "human resour-

Penulis adalah kasubbag GADIK FIK-PTIK

ces", yaitu kemampuan perwira staf dalam perencanaan operasional ditingkat Polres.

Beberapa masalah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan mendeskripsikan dalam tulisan ini antara lain : Apakah Perwira Staf Polres yang bertugas dalam perencanaan operasional sudah memahami konsep seperti social engineering, IPK, komunikasi dan pelembagaannya? Bagaimanakah konsep serta ketrampilan mereka mengenai perencanaan operasional ditingkat Polres saat ini? Apabila diketemukan kelemahan-kelemahan dan hambatannya, bagaimanakah implikasinya terhadap upaya peningkatan kemampuan mereka dalam rangka social engineering dibidang IPK?

Selain beberapa masalah tersebut, sinyalemen Ketua Pusat Kerjasama Ilmiah (PKSI) Kopertis Wilayah V, Dr. Supriyoko, SDU, Mpd, bahwa "Research University" masih jauh dari Perguruan Tinggi ⁴⁾ juga semakin mendorong penulis untuk melakukan penelitian (meskipun secara sederhana) dan melaporkan hasilnya melalui majalah ilmiah PTIK.

Untuk memperoleh data empirik yang aktual pada bulan Maret 1990 penulis melakukan penelitian sederhana dengan metode studi kasus terhadap 3 Perwira Staf Polres Jembrana yang masing-masing menjabat sebagai Kapuskodalops, Kasat IPP dan Kasat Binmas. Teknik yang digunakan ialah wawancara langsung

secara bergantian dengan berpedoman pada pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan sebelumnya. Selain wawancara, juga dilakukan penelitian dokumen tertulis hasil karya mereka dibidang perencanaan yaitu "Rencana Pengamanan Peresmian Bendungan Palasari oleh Presiden tanggal 23 Juli 1989" dan "Rencana Pengamanan Hari Raya Galungan dan Kuningan Polres Jembrana" pada bulan Agustus 1989.

Meskipun diakui bahwa hasil studi kasus tersebut belum dapat digunakan untuk menggeneralisasikan semua Pa Staf Polres di seluruh Indonesia, namun demikian studi "tipologis" semacam studi kasus, temuan-temuannya juga dianggap mempunyai nilai generalisasi sepanjang memiliki kesamaan tipologi dengan subyek/konteks yang diteliti. Dalam perbendaharaan penelitian kualitatif, ini disebut dengan istilah "transferability generalicity"⁵⁾.

KELEMAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA BARU BERKEMBANG

Gagasan Administrasi Pembangunan merupakan salah satu kecenderungan baru dalam administrasi negara. Kecenderungan ini seperti disebutkan oleh Dr. Awalodin Djamin adalah administrasi negara yang lebih diarahkan pada tugas-tugasnya yang baru di bidang pembangunan. ⁶⁾ Administrasi Kepolisian sebagai salah satu fungsi dari Administrasi negara tentu tidak

terlepas dari kecenderungan tersebut. Oleh sebab itulah pembahasan masalah social engineering di bidang IPK dari aspek manajemen yaitu perencanaan operasional tidak terlepas dari konteks Administrasi Pembangunan, khususnya Perencanaan Pembangunan.

Menurut Prof. Bintoro dalam bukunya "Perencanaan Pembangunan" 7) ada 8 kelemahan yang diamati dalam perencanaan pembangunan di negara-negara baru berkembang. Berikut ini dikutip 3 kelemahan yang dianggap menonjol dan relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Kurangnya penguasaan terhadap teknik-teknik perencanaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga terdidik dalam bidang tersebut. Penguasaan teknik-teknik tersebut memerlukan pengetahuan spesialisasi.
2. Kurangnya data statistik, informasi, hasil-hasil riset dan survey untuk mendasari suatu perencanaan yang baik.
3. Perencanaan kurang berorientasi pada pelaksanaannya, termasuk pula pengendaliannya.

Dengan mengutarakan kelemahan tersebut, tidak dimaksudkan untuk menguji dalam praktek penyelenggaraan administrasi Polri, namun perlu dijadikan titik tolak berfikir reflektif bagi semua jajaran dan tingkat Administrasi Kepolisian RI dalam upaya peningkatan kemampuan perencanaan bidang pem-

binaan maupun operasional khususnya dalam konteks tugas Polri dalam pembangunan, antara lain social engineering di bidang IPK.

FRAME OF REFERENCE DAN FIELD OF EXPERIENCE

Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, seorang pakar administrasi, mengatakan bahwa : "Faktor pandangan hidup, pengetahuan dan kemampuan pribadi dari si perencana sangat menentukan isi dan mutu rencana". 8) Oleh karena itulah perlu dikenal kerangka acuan dan lapangan atau bidang pengalaman ketiga Perwira yang diteliti tersebut. Secara singkat diuraikan berikut ini. Kapuskodalops dan Kasat Binmas berpangkat Lettu, sedangkan Kasat IPP berpangkat Letda. Ketiganya berpendidikan SLTA. Diawali pendidikan dasar agen Polisi, ketiganya menjadi Perwira melalui Secapa pada tahun 1980, 1982 dan 1984. Kapuskodalops memperoleh Dikjur Binjas Pol, Penyidik dan Akta III IKIP. Selama 23 tahun mengajar sebagai instruktur dan baru setahun tugas di Polres.

Kasat Binmas memperoleh Dikjur Sabhara. Pernah mengajar sebagai instruktur selama 8 tahun, 4 tahun staf personil dan 12 tahun tugas operasional di Polsek Kp3, Pampata, dan Binmas. Kasat IPP memperoleh Dikjur Ba Intel dan bahasa Inggris. Selama 24 tahun masa dinas selalu tugas operasional yaitu Sabhara, Reserse, Binmas

dan IPP. Selama pendidikan di Se-
capa mereka mengatakan mendapat
pengetahuan teori tentang dasar-
dasar perencanaan pada umumnya.
Mereka belum memperoleh penge-
tahuan maupun ketrampilan mem-
buat perencanaan operasional. Yang
dibuat selama ini dipelajarinya dari
MOP (Manajemen Operasional Pol-
ri) 9) serta pengarahan Kapolres
dan contoh rencana yang sudah ada
sebelumnya.

KONSEP TENTANG IPK, SOCIAL ENGINEERING, KOMUNIKASI DAN PELEMBAGAAN.

Pengertian ke tiga perwira terse-
but tentang IPK meskipun berbeda
dalam rumusan, namun intinya sa-
ma dengan pengertian menurut
Mabes Polri yaitu upaya masyara-
kat dalam mengamankan diri dan
lingkungannya secara swakarsa. Na-
mun masih ada perbedaan dalam
visi. Perwira tersebut masih meman-
dang IPK sama dengan pola kegiat-
an fungsi Binmas yang secara kon-
krit mereka kenal sehari-hari seperti
siskamling, ronda kampung, PKS,
Satpam dan sebagainya.

Menurut pengarahan Kapolri,
yang digarap justru "struktur yang
tidak tampak," 10) yaitu potensi
masyarakat, baik potensi terjadinya
GK maupun potensi masyarakat
dalam penanggulangan kriminalitas.
Dengan demikian harus dicari dan
ditemukan unsur-unsur SWOT
(strength, weakness, opportunity
and threat) yang ada dalam masya-

rakat itu sendiri. Mungkin disinilah
letak masalahnya. Untuk dapat me-
nganalisis SWOT masyarakat dija-
jaran Polda Nusra misalnya, perlu
penelitian sosial mulai dari Bali,
Lombok, Sumba dan seterusnya,
sampai Timor Timur. Masing-ma-
sing daerah tersebut masih dapat di-
bedakan lagi menurut etnis, agama,
geografi, adat dan sebagainya. Ini
memerlukan waktu, tenaga dan bi-
aya yang sangat besar. Apabila Pol-
da mengambil jalan pintas dengan
mengambil generalisasi dari bebera-
pa contoh yang ada, memang dapat
dijadikan pedoman oleh Polres, te-
tapi pada akhirnya toh Polres ma-
sih harus melakukan penelitian
SWOT masyarakat di daerahnya se-
cara rinci sebagai dasar penentuan
sasaran dan cara bertindak dalam
perencanaan operasional pem-
bangunan IPK di daerahnya.

Mengenai social engineering (re-
kayasa sosial), menurut Mabes Pol-
ri 11) pengertiannya ialah upaya-
upaya untuk mewujudkan cara ber-
pikir, bersikap, bertindak masyara-
kat serta memotivasi dan mempa-
silitasi potensi-potensi institusi, ko-
munitas dan organisasi di lingkung-
an masyarakat dalam kerangka pen-
ciptaan siskamtibmas swakarsa.

Ketika ditanyakan pengertian
tentang social engineering, mereka
merasa masih asing dengan istilah
ini dan belum memahami konsep
tersebut. Mengenai konsep komuni-
kasi, diberikan contoh kegiatan se-
perti tatap muka, sambang desa,

penyuluhan dan sebagainya. Selain itu, konsep mereka juga menyangkut alat komunikasi seperti radio, telephon, HT dan sejenisnya. Pemahaman tersebut perlu diperluas dan diperdalam dengan proses, jenis media, teknik serta faktor faktor yang mempengaruhi komunikasi, khususnya di bidang social engineering dalam konteks pembangunan IPK. Ketika ditanyakan tentang media komunikasi yang paling dianggap cocok bagi masyarakat di daerahnya, diperoleh jawaban berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang paling cocok adalah dengan tatap muka, sambang desa dan atau pos ronda, penyuluhan langsung dan sebagainya. Yang lain berpendapat bahwa kesenian tradisional merupakan media yang paling cocok di daerahnya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan khususnya tentang siskam swakarsa. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena belum diadakannya pengkajian melalui penelitian sosial yang dapat dipertanggungjawabkan yang hasilnya dapat dibakukan dan dijadikan acuan oleh semua perwira Polres yang bersangkutan atau yang termasuk dalam wilayah penelitian yang sama. Masalah lain yang perlu dipecahkan dalam komunikasi menurut Harold Lasswell 12) adalah pertanyaan berikut :

Who
Says What
In Which channel
To whom

With what effect

Ketika ditanyakan siapa (Who) yang sebaiknya diberi tugas untuk mengkomunikasikan IPK ini kepada masyarakat diperoleh jawaban yang berbeda. Yang pertama berpendapat bahwa petugas yang paling tepat ialah Babinmas (Babin-kamtibdes). Yang lain berpendapat bahwa sebaiknya termasuk semua staf dan Kasatfung juga dilibatkan. Apabila kita menganalisis pertanyaan penuntun dari Harold Lasswell tersebut, perlu digolong-golongkan menurut kelompok petugasnya (Who), tiap-tiap kelompok tersebut mendapat "porsi" untuk menyampaikan materi pesan apa (Says what), bagaimana saluran (in which channel) yang digunakan oleh masing-masing kelompok tersebut, bagaimana pembagian kelompok masyarakat (To whom) yang menjadi sasaran dari tiap kelompok komunikator Polri tersebut, dan terakhir effect atau hasil (perubahan perilaku atau sikap) apakah yang diinginkan dari tiap kelompok masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Babinkamtibdes perlu diidentifikasi lebih dulu ruang lingkup tugas, sasaran, cara bertindak, pendekatan, saluran komunikasi yang digunakan dan sebagainya.

Mengacu kepada hasil penelitian James Mc Croskey, Carl Larson dan Mark Knapp bahwa komunikasi yang homopilus (memiliki kesederajatan dalam pendidikan, status sosial, ekonomi dan sebagainya)

akan lebih efektif 13)), maka Babinkamtibdes hanya akan efektif terhadap kelompok masyarakat di desa binaan yang sederajat atau yang lebih rendah dengannya. Yang menjadi pertanyaan ialah : Siapa yang membina masyarakat yang derajad sosialnya diatas Babinkamtibdes dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan bahkan tingkat nasional. Hal ini memerlukan perumusan lebih dulu. Untuk tingkat Polres secara efektif mampu membina kelompok dan tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh tingkat kabupaten/kodya setempat. Apabila suatu proyek pembangunan yang kebijaksananya ditetapkan oleh propinsi diantisipasi mempunyai potensi terjadinya GK, maka pembinaan terhadap pengambil kebijaksanaan tersebut akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh Polda, bukan oleh Polres. Dengan demikian perlu penajaman mengenai klasifikasi pembina Kamtibmas tingkat Desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional selaras dengan derajad sosial dari kelompok dan tingkat "ketokohan" tokoh masyarakat yang dibina tersebut.

Menurut Mabes Polri disebutkan pengertian pelebagaan (institusionalisasi) sebagai upaya agar nilai-nilai atau norma-norma (yang menunjang IPK) menjadi bagian dari nilai-nilai dan norma-norma dari institusi, komunitas dan organisasi yang menjadi unsur IPK.

Mereka belum memahami konsep

pelebagaan ini. Mereka memberikan contoh pelebagaan antara lain dengan membuat program IPK secara internal dalam tugas-tugas Polri, tetapi yang harus dipikirkan ialah bagaimana melebagaan IPK dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan bagi Perwira Staf Polres adalah bagaimana merumuskan sasaran, cara bertindak dan memilih alternatif pendekatan sosiologis yang terbaik dan paling cocok serta feasible dalam upaya pelebagaan IPK terhadap masyarakat di daerahnya.

Selain lomba siskamling atau ronda kampung yang biasanya diadakan bersamaan dengan lomba desa atau hari Bhayangkara, atau berbagai bentuk kegiatan seperti Polisi sahabat anak, Polisi mitra remaja dan sebagainya, perlu diteliti dan diinventarisasi adanya lembaga kemasyarakatan di daerah setempat yang dapat dijadikan sarana atau media pelebagaan IPK. Jika perlu diadakan suatu kegiatan kreatif sesuai dengan karakteristik dan perkembangan masyarakat setempat. Tidak perlu meniru program pelebagaan yang dilaksanakan kesatuan lain jika kondisi sosio kultural serta tingkat perkembangan masyarakatnya berbeda. Dengan kata lain disesuaikan dengan potensi negatif yang mengarah terjadinya GK.

Dalam upaya pelebagaan IPK, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelebagaan. Bagaimana proses pelebagaan itu berjalan dalam masyarakat

digambarkan oleh Soerjono Soekanto 15) dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Proses pelebagaan} = \frac{\text{(Efektivitas menanamkan unsur baru)} \times \text{(Kekuatan menentang dari masyarakat)}}{\text{Kecepatan menanam unsur-unsur yang baru.}}$$

Efektivitas menanam adalah hasil yang positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metoda untuk menanamkan lembaga baru di dalam masyarakat. Dalam pada itu setiap usaha menanam sesuatu yang baru akan mengalami reaksi dari beberapa golongan masyarakat yang merasa dirugikan. Kekuatan menentukan dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan. Pengaruh ketiga dalam proses pelebagaan ini datangnya dari faktor kecepatan menanam.

Yang diartikan dengan kecepatan menanam itu adalah panjang atau pendeknya jangka waktu di mana usaha menanam itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil. Semakin tergesa-gesa orang berusaha menanam dan semakin cepat orang mengharap hasil, semakin tipis efek proses pelebagaan di dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya. Efektivitas kecepatan usaha-usaha menanam tersebut sebenarnya tak dapat dilihat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan de-

ngan faktor efektivitas akan menyebabkan bahwa hasil proses pelebagaan tidak akan berkurang. Hasil tersebut akan berkurang, apabila hanya kecepatan menanam saja yang ditambah tanpa memperbesar efektivitasnya.

Dengan memahami formula tentang pelebagaan tersebut, keinginan untuk memperoleh hasil pelebagaan harus disesuaikan dengan kemampuan manusia, alat-alat, organisasi dan metoda yang dimiliki. Hal ini harus diperhitungkan dalam perencanaan. Demikian pula perlu diidentifikasi kekuatan yang menentang pelebagaan norma baru tersebut dan dicari upaya penangkalnya. Apabila hal ini dilalaikan, bisa mengurangi efektivitas pelebagaan yang dilaksanakan.

KELEMAHAN DALAM PERENCANAAN OPERASIONAL

Dari hasil penelitian terhadap dua berkas perencanaan 16) karya ketiga Perwira Staf Polres, ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut :

1. Dalam sistematika, masih ditemukan adanya ketidak sesuaian dengan pola SITUPAK. Tidak ada perencanaan dalam administrasi logistik dan komando pengendalian.
2. Tidak ada kirka atau forecasting. Prof. Prajudi Atmosudirdjo 17) mengatakan adanya 4 unsur pokok dalam suatu rencana pada umumnya yaitu : tujuan, fakta-fakta, kirka dan upaya atau aktivitas untuk mencapai tujuan.
3. Dalam kirka yang diteliti dalam salah satu rencana, ditemukan kelemahan yaitu tidak adanya analisa terhadap data mentah berupa crime total tahun sebelumnya. Tidak ada analisa faktor-faktor korelatif kriminogen yang diperkirakan mengakibatkan crime total tersebut, yang sangat perlu untuk penentuan sasaran dan cara bertindak yang lebih tepat untuk langkah penanggulangan tahun berikutnya.
4. Kurangnya data statistik yang mendukung kirka. Misalnya : diperkirakan bahwa pengangguran merupakan faktor korelatif kriminogen, namun tidak didukung data penganggur atau pencari kerja. Demikian pula data seperti jaringan informasi atau data tentang perahu milik masyarakat yang diperlukan dalam pendayagunaan logistik wilayah dalam penanggulangan bencana massal.
5. Kurangnya pemahaman dalam istilah teknis perencanaan. Sasaran

atau target dirumuskan dengan "membraur dalam masyarakat", yang lebih tepat sebagai cara bertindak taktis. Hasil yang ingin dicapai dirumuskan "Kamtibmas dan lalin yang mantap". Dibidang anggaran dan logistik dirumuskan dengan "menggunakan logistik dan anggaran yang ada". Ini terlalu luas, umum dan abstrak. Tidak "accountable".

6. Kodal hanya disebutkan ada pada Kapolres dan Kapolsek di Poskotis. Tidak dirinci bagaimana mekanisme kodal mulai dari Kaunit lapangan sampai Kapolres termasuk sasaran kodal, cara bertindak, sarana dan waktu yang ditetapkan dalam pelaporan, monitoring dan sebagainya.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERENCANAAN OPERASIONAL DAN SOCIAL ENGINEERING DI-BIDANG IPK.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa penjabaran kebijaksanaan pimpinan Polri khususnya social engineering di bidang IPK (di Polres yang diteliti) masih ditemui beberapa kendala, khususnya kelemahan pada aspek manusia perencananya. Kendala tersebut ialah kurangnya pemahaman dan ketrampilan dalam perencanaan operasional serta kurangnya pemahaman masalah social engineering, komunikasi dan pelembagaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kurangnya pemahaman terhadap konsep dasar serta masalah teknis

yang menyertai kegiatan tersebut, bisa mengakibatkan kekeliruan dalam penentuan sasaran/target dan cara bertindak.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah yang disarankan antara lain :

1. Sebagai terobosan, langsung diberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan terhadap Perwira Staf yang bertugas dalam perencanaan operasional, khususnya mengenai pengertian, unsur-unsur dan cara atau praktek membuat suatu rencana operasional. Jika juklak atau juknis yang telah ada dirasakan masih kurang jelas, perlu diberikan contoh atau model perencanaan operasional yang baik untuk tingkat Polres. Selain IPK, mereka juga perlu diberikan pemahaman tentang social engineering, komunikasi dan pelebagaan oleh petugas atau pengajar yang mahir dan berpengalaman di bidangnya. Jika perlu menggunakan bantuan tenaga ahli di luar Polri.
2. Dengan kelangkaan tenaga, pengetahuan, ketrampilan dan sebagainya, di bidang penelitian social, perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat untuk menganalisis potensi GK dan masyarakat serta pendekatan yang terbaik dalam komunikasi dan pelebagaan IPK pada kelompok masyarakat di tiap daerah secara tipologis. Mungkin program ini lebih feasible jika dilaksanakan

oleh Polda.

3. Selain upaya terobosan, secara strategis kondisi ini perlu dijamin titik tolak bagi Lembaga Pendidikan Perwira Polri (khususnya Secapa) untuk meningkatkan metode pendidikan di bidang perencanaan operasional serta bobot yang lebih menonjol mengenai social engineering, komunikasi dan pelebagaan dalam mata pelajaran ilmu sosial yang diberikan. Di samping menyangkut metode, perlu diperhatikan keseimbangan berbagai aspek perilaku siswa yang akan diubah atau ditingkatkan melalui pendidikan terutama antara aspek kognitif yang menyangkut pengetahuan, pengertian, dan pemahaman serta aspek motoris (18) yang menyangkut keterampilan mengaplikasikan segala pengertian dan pengetahuan yang telah diperolehnya.
4. Selain melalui pendidikan formal, cara lain untuk menambah pengetahuan Perwira terutama di bidang manajemen dan ilmu sosial terapan ialah melalui media pengembangan profesi seperti majalah ilmiah PTIK atau Lemdik lainnya serta majalah Polri masing-masing kesatuan yang umumnya ada pada tiap Polda. Demikianlah beberapa saran yang dapat diajukan, semoga bermanfaat bagi setiap insan Polri yang menginginkan kemajuan dalam tugasnya, khususnya pengembangan sumber daya manusia, sebagai salah

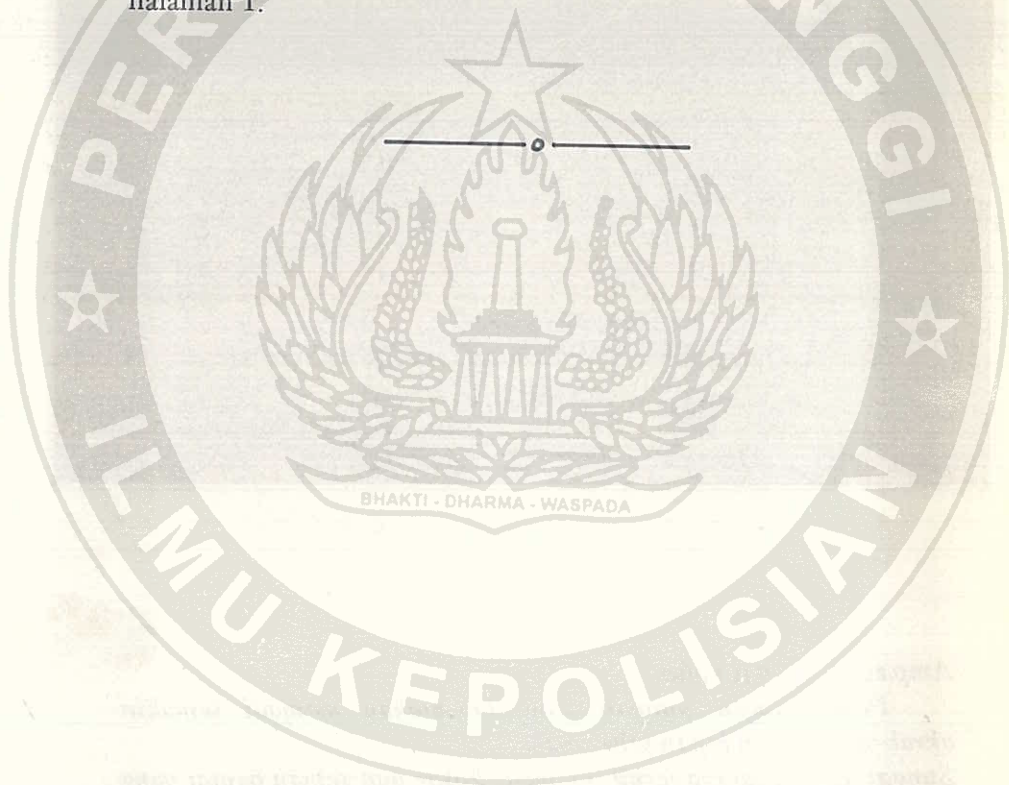
satu asset Polri yang paling berharga da sangat menentukan dalam mengemban mission Polri pada era pembangunan dewasa ini serta era

"Megatrends 2000" sebagaimana diramalkan John Naisbitt dan Patricia Aburdene. Selamat bertugas!

CATATAN KAKI :

1. Kapolri Penjelasan Pada Acara Dengar Pendapat Dengan Komisi I DPR-RI Tentang : *Pelaksanaan Tugas Polri dibidang Operasional dan Pembinaan Dalam Menghadapi Perkembangan Masyarakat Di Indonesia*, Mabes Polri, Jakarta, 1990.
2. BERITA, Kerja Sama PTIK Dan UGM, *Harian Kompas*, Jakarta, 14 Februari 1990.
3. BERITA, Kasus Rekonstruksi Seksual : Hikmahnya, Polri Mesti Tekankan Fungsi Binmas, *Harian Kompas*, Jakarta, 19 Maret 1990.
4. BERITA, "Research University" Masih Jauh Dari Perguruan Tinggi, *Harian Kompas*, Jakarta, 17 Maret 1990.
5. SNAPIAH FAISAL, *Penelitian Sederhana*, Ya 3, Malang, 1989, halaman 29.
6. TJOKRO AMIDJOJO, BINTORO, PROF, MA, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3 ES, Jakarta, 1975.
7. ———, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, halaman 53.
8. ATMOSUDIRDJO, PRAJUDI, PROF, DR, *Administrasi Dan Management Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 178.
9. MARKAS BESAR POLRI, *Manajemen Operasional Polri*, Mabes Polri, Jakarta, 1989.
10. KAPOLRI, *Pengarahan Pada Penutupan Gelar Opsnal 1990*, Mabes Polri, Jakarta, 1990, halaman 8.
11. MARKAS BESAR POLRI, *Pokok-pokok Pembangunan IPK*, Dislitbang Polri, Jakarta, 1989, halaman 6.
12. MACENDREWS, COLLIN DAN DEPARI, EDUARD, *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta, 1988, halaman 6.
13. THOHA, MIFTAH, DRS, MPA, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, halaman 118.
14. *Libat Pokok-pokok Pembangunan IPK*, Op. Cit, halaman 21.

15. SOEKANTO, SOERJONO, PROF, DR, *Pengantar Sosiologi Hukum* 1973, halaman 103.
16. POLRES JEMBRANA, *Rencana Pengamanan Peresmian Bendungan Palasari Oleh Presiden*, Polres Jembrana, Jembrana, 1989, bulan Juli.
-----, *Rencana Pengamanan Hari Raya Galungan dan Kuningan*, Polres Jembrana, Jembrana, 1989, bulan Agustus.
17. ATMOSUDIRDJO, PRAJUDI, *Op. Cit*, halaman 192.
18. SURYA, MOH, DR, *Psikologi Pendidikan*, IKIP, Bandung, 1985, halaman 1.





BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Ampas merampas nafas.

Pemandangan sampah yang berserakan menjadi semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari.

Sungai yang awalnya jernih menjadi kotor dan tepian pantai yang indah menjadi sarat dengan sisa-sisa plastik yang menyesakkan.

Apakah hal ini akan dibiarkan !

Gambar : Salah satu pemandangan di daerah penjaringan (Jakarta Utara).

ENGLISH CORNER

Pembaca yang budiman,

English Corner kita kali ini mengetengahkan satu bacaan menarik yang memberikan ilustrasi tentang perbedaan perilaku/tindakan antara pengendara pria dan wanita.

Selain melatih dan meningkatkan pemahaman membaca (Reading Comprehension), diharapkan bacaan tersebut dapat pula mengingatkan kembali pengetahuan tentang tingkat perbandingan (Degrees of Comparison, utamanya Comparison of Adverbs) dalam bahasa Inggris, misalnya *Faster, More Carefully, Less Recklessly* dan lain-lain.

Selamat belajar.

Read this short report, and then answer the questions.

A British university is now doing research into the difference between men and women drivers.

It seems that women often drive more carefully than men. The research suggests that men drive faster and more recklessly, but that they also react a bit faster in emergencies. This is perhaps because it seems they concentrate more when they are driving.

From: Kernel Lesson Intermediate by Robert O'neiu.

1. Correct these Statements :

(Yang perlu anda betulkan bukan grammar/tata bahasa, melainkan

isi kalimatnya).

- a). It seems that men drive **more slowly than** women do.
- b). Men drive **less recklessly than** women do.
- c). Men react **more slowly than** women do in emergencies.
- d). Men **concentrate less when** driving than women **do**.

2. Give Full Answers to These Questions :

- a). What is The University **doing** research into?
- b). What is the **difference in the** way men and women drive?
- c). What does the research **say** about the difference in **emergencies**?
- d). Why is that so ?

Jawaban latihan yang diberikan pada English Corner Majalah Bhayangkara No. 011/1990.

1. Sequencing :

- 1). The lorry was driving north.
- 2). It had a puncture.
- 3). It skidded across the road.
- 4). A green ford which was travelling south hit the lorry.
- 5). A Morris which was travelling north also hit the lorry.
- 6). The driver was killed instantly.
- 7). The road was blocked for an hour.

2. Linking :

- a). The photographer took pictures while the policemen were making chalk-marks on the road.
- b). PC 57 spoke to mrs. Smith while the firemen were free-

ing Mr. Smith from his car.

- c). The second ambulance arrived while the first ambulance was leaving.
- d). The policeman wrote his report while the crane was clearing the road.

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)



KAYU JATI OLAHAN :

- KAYU JATI GERGAJIAN
- PARKET MOSAIK/LANTAI KAYU
- PARKET BLOK
- PANEL DINDING
- PLINTH/SKIRTING
- PINTU SOLID
- BRIEFCASE, DLL.

KAYU BULAT :

- J A T I
- SONOKELING
- MAHONI
- RASAMALA
- P I N U S
- DLL.

HASIL HUTAN NON KAYU :

- GONDORUKEM
- TERPENTIN
- MINYAK KAYU PUTIH
- LAK
- BENANG SUTERA ALAM
- DLL.

SILAKAN HUBUNGI :

JAKARTA : Direksi Perum Perhutani, Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 4

Jl. Gatot Subroto, Senayan PO. Box. 19/Jkwb, Jakarta Pusat (10270)

Telp. : 583 048, 587 790, 583 038 Telex : 46283 Phtdir Jkt

Fax : (021) 582451